

PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA LEGISLATIF SUATU STUDI DI DPRD KABUPATEN KAPUAS HULU

Ade M. Yuardani dan Mahendra Jaya

Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak
Jalan Ahmad Yani Pontianak 78124
E-mail: minsut_benuis@yahoo.com

Abstrak: Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kapuas Hulu adapun obyek yang diteliti adalah kemampuan anggota DPRD periode 2009-2014, adapun informannya adalah Ketua DPRD dan anggota Komisi B DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif analisis.

Kata Kunci: Kemampuan sumber daya legislatif, peraturan daerah, DPRD, Kapuas Hulu

LATAR BELAKANG

Kabupaten kapuas Hulu (KH) merupakan salah satu dari 14 kabupaten/Kota yang ada Kalimantan Barat (Kal-Bar). KH terletak di timur Kal-Bar memiliki luas (29.842,00), serta memiliki 23 Kecamatan, secara geografis KH memiliki letak yang sangat strategis, karena KH berbatasan dengan negara tetangga yaitu serawak. Memiliki perbatasan dengan negara tetangga merupakan keuntungan tersendiri bagi kabupaten kapuas hulu dalam penyelenggaraan pemerintahan, akan tetapi juga memiliki tantangan yang sangat besar apabila tidak diimbangi dengan kemampuan aparturnya dalam merencanakan dan melaksanakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten KH yang letaknya cukup jauh dari ibukota provinsi Kal-Bar memerlukan sumberdaya manusia (SDM) berkualitas dalam melaksanakan dan menyelenggarakan pemerintahan. Dengan SDM, yang berkualitas di harapkan nantinya dapat melaksanakan tugas yang cukup berat

dalam penyelenggaraan pemerintahan. SDM yang baik dan berkualitas bukan hanya di miliki oleh eksekutif akan tetapi juga harus di miliki oleh anggota Legislatif (DPRD). Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan memberikan penguatan terhadap jalannya pemerintahan, serta dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan sejahteranya masyarakat akan membuat kedaulatan masyarakat semakin terjaga dengan baik.

Kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dalam pelaksanaannya diwujudkan melalui lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampu menampung nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat, termasuk kepentingan daerah, agar sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Guna meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan disetiap

daerah di perlukan perencanaan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Kapuas hulu merupakan daerah yang memiliki perbatasan dengan negara tetangga memerlukan pemikir dan sekaligus pekerja yang mampu memenuhi berbagai tuntutan kebutuhan masyarakatnya. Masyarakat perbatasan yang sekarang ini masih dalam keadaan kekurangan berbagai fasilitas, Keterbatasan ini menyebabkan masih rendahnya pendapatan masyarakat. Rendahnya pendapatan masyarakat menyebabkan rendahnya kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Pola pekerjaan yang ada masih bersifat pekerjaan turun temurun yaitu berladang dan berkebun merupakan mata pencaharian utama masyarakat yang ada di perbatasan. Oleh sebab itu pembangunan di perbatasan tidak hanya merupakan tugas eksekutif akan tetapi juga merupakan tugas Legislatif untuk turut memikirkan berbagai kebutuhan dan menyediakan kebutuhan masyarakat, agar masyarakat yang ada di perbatasan dapat menikmati pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan dan politik bangsa, termasuk perkembangan dalam lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah, dan lembaga perwakilan rakyat daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dimaksudkan sebagai upaya penataan susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah, serta lembaga perwakilan rakyat daerah.

Peningkatan SDM bukan hanya di lakukan eksekutif akan tetapi juga wajib di lakukan oleh legislatif, peningkatan SDM ini nantinya akan memberikan keuntungan bagi pemerintah, terutama masyarakat KH. Kapuas Hulu memiliki potensi yang masih dapat di kembangkan bukan hanya sebagai daerah konservasi akan tetapi juga karena memiliki perbatasan dengan negara malaysia maka di perlukan kemampuan perwakilan rakyat yang memiliki kapabilitas dan komitmen yang kuat guna membangun Kapuas Hulu kedepan.

Berdasarkan pengamatan sementara yang di lakukan Penulis bahwa masih banyak terdapat kebutuhan masyarakat yang ada di perbatasan masih perlu di tingkatkan, walaupun di sadari bahwa untuk melaksanakan suatu pembangunan di perlukan biaya yang tidak sedikit. Akan tetapi komitmen eksekutif dan legislatiflah yang seharusnya dapat merubah kondisi daerah menjadi lebih baik. Hal inilah yang menyebabkan penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan kemampuan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat.

Penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan dengan baik apabila di ikuti dengan kemampuan aparturnya yang baik pula. Kemampuan pemerintah melihat potensi dan tantangan yang ada di perbatasan

seharusnya dapat merubah kondisi perbatasan menjadi lebih baik lagi, selain itu juga sangat di perlukan kemampuan Anggota DPRD yang merupakan aparatur pemerintah juga bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan. Kemampuan anggota DPRD yang sangat di perlukan adalah melihat berbagai permasalahan yang di hadapi oleh pemerintah kapuas hulu terkait dengan pembangunan di perbatasan, sehingga dengan melihat berbagai fakta yang ada di masyarakat anggota DPRD dapat menggunakan fungsi mereka terutama di bidang anggaran agar pembangunan yang ada di perbatasan perlu di tingkatkan, untuk itu anggota DPRD Kapuas Hulu juga di tuntutan untuk mengembangkan kemampuan mereka guna melaksanakan fungsi anggota Legislatif.

TINJAUAN PUSTAKA

Penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini merupakan pemerintahan yang harus berorientasi kepada bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat, kebutuhan masyarakat sangat komplek apabila kita cermati secara seksama. Pemerintah dalam melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan sekarang ini di tuntutan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan bukan hanya baik (*Good Governance*) akan tapi juga pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*). Kedua hal ini merupakan jaminan akan keberhasilan jalannya pemerintahan yang di dambakan semua orang.

Pemerintahan yang seperti di atas bukan hanya di dapatkan melalui cara yang instan atau dengan mudah, akan tetapi pemerintahan seperti itu akan di dapatkan apabila semua pihak menyadari bahwa

penyelenggaraan pemerintahan itu merupakan amanah yang harus di pertanggungjawabkan oleh semua aparatur baik eksekutif maupun Legislatif. Masing-masing lembaga ini harus menyadari tugas dan fungsi mereka dengan baik. Dengan demikian akan terlaksana apa yang menjadi keinginan bersama yaitu terciptanya pemerintahan yang baik.

Untuk melaksanakan pemerintahan yang baik tersebut di perlukan aparatur yang benar-benar siap untuk melaksanakan pekerjaan dan tanggungjawab mereka dengan penuh komitmen. Selain itu untuk meningkatkan kemampuan aparatur baik eksekutif maupun legislatif perlu melakukan banyak studi baik yang formal maupun nonformal. Demikian juga halnya di DPRD Kapuas-Hulu, anggota DPRD untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman mereka sudah seharusnya anggota DPRD melaksanakan berbagai studi Banding ke daerah-daerah yang memiliki kesamaan potensinya dengan Kabupaten Kapuas Hulu.

Pentingnya pengembangan SDM anggota DPRD ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada anggota DPRD serta bertujuan untuk melakukan tukar pendapat dengan daerah yang di tuju. Peningkatan dan pengembangan sumberdaya yang di arahkan untuk meningkatkan kemampuan sangat di butuhkan. Seperti di katakan Kumorotomo (1997: 32), pengembangan sumber daya manusia adalah "Suatu cara (means) untuk menghasilkan suatu". Dengan di lakukan studi banding seharusnya kemampuan anggota DPRD kapuas hulu semakin baik.

Sebagai lembaga yang terhormat kemampuan dan kredibilitas anggota DPRD

seharusnya jauh lebih baik di bandingkan dengan legislatif, sehingga dalam berbagi pekerjaan yang sudah menjadi tugas dan tanggungjawab mereka dapat di laksanakan dengan baik. Perubahan masyarakat dan kebutuhan masyarakat yang begitu cepat inilah yang harus di perhatikan oleh anggota DPRD. Seperti di katakan Mondy et.al. dalam Yuniarsih (2008:6) “Pengembangan sumber daya manusia ini penting dilaksanakan disebabkan adanya perubahan baik manusia, teknologi, pekerjaan maupun organisasi “

Pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu fungsi operasional Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) yang berisi kegiatan-kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kompetensi pegawai melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan aspek-aspek lainnya. Menurut Sulistiyani (2004: 36) “Peningkatan kompetensi sumber daya manusia akan memberikan kesempatan belajar kepada aparat pemerintah. Akan tetapi harus dibarengi dengan asumsi bahwa hasil yang dicapai haruslah positif”

Kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik harus dimiliki oleh setiap orang yang berada dalam suatu organisasi begitu dengan anggota DPRD yang merupakan perwakilan rakyat seharusnya sudah memiliki berbagai kemampuan yang dapat memberikan solusi dan bagi permasalahan yang di hadapi pemerintah daerah. Perkembangan Kapuas Hulu yang semakin hari semakin baik sangat memerlukan SDM yang terampil dalam berbagai bidang. Untuk menjawab semua tantangan yang dihadapi tersebut pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu,

terutama anggota DPRD Harus memiliki sumber daya yang berkualitas. Seperti di katakan Leonard Nadler (dalam Hardjana, 2001: 11) pengembangan sumber daya manusia adalah kegiatan-kegiatan belajar yang diadakan dalam jangka waktu tertentu guna memperbesar kemungkinan untuk meningkatkan kinerja.

Kemampuan yang di miliki anggota DPRD harus dapat melebihi kemampuan eksekutif, hal ini di karnakan permasalahan yang akan di hadapi nantinya adalah bagaimana memecahkan dan memberikan solusi terhadap berbagai kebutuhan masyarakat Kapuas Hulu yang semakin komplek. Kemampuan anggota Legislatif yang baik nantinya akan merupakan modal bagi pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam mensejajarkan kabupaten ini dngan Kabupaten lainnya yang ada di Kalimantan Barat.

PEMBAHASAN

Kapuas Hulu merupakan Kabupaten yang berbatasan dengan negara tetangga malaysia, kedekatan secara Geografis ini sangat menguntungkan masyarakat dan pemerintahan Kapuas hulu sendiri. Dengan memiliki perbatasan dengan negara Malaysia, akan memberikan banyak keuntungan apabila daerah perbatasan ini di bangun secara berkesinambungan dengan memperhatikan pembangunan yang berkeadilan dan aspek pemerataan. Masyarakat yang ada di Perbatasan Kapuas hulu sekarang ini masih di hadapkan dengan keterbatasan infrastruktur terutama jalan yang kurang memadai.

Memperhatikan kondisi Kabupaten Kapuas Hulu sekarang ini dibandingkan dengan beberapa kabupaten lainnya di

Kalimantan Barat masih terdapat kesenjangan pembangunan yang di laksanakan oleh pemerintah, kondisi seperti ini akan sangat memprihatinkan lagi apabila dalam berbagai program pembangunan yang akan dan sedang dilaksanakan tidak dibarengi oleh kemampuan aparatur pemerintah maupun anggota legislatif dalam merencanakan dan melihat berbagai permasalahan yang sedang di hadapi pemerintah daerah.

Kemampuan seorang anggota legislatif akan sangat mempengaruhi daya saing suatu daerah, seperti di katakan Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, bahwa dengan memiliki anggota legislatif yang memahami tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat dapat memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kemampuan ini bukan hanya intelektual semata akan tetapi bagaimana anggota Legislatif dapat melihat berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Kapuas Hulu sehingga berbagai potensi yang ada dapat dimanfaatkan guna meningkatkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kapuas Hulu itu sendiri.

Kemampuan intelektual saja tidak cukup untuk menghasilkan pembangunan yang baik dan merata apabila tidak diimbangi dengan kemampuan bagaimana melakukan komunikasi kepada stakeholder yang ada. Masyarakat sebagai obyek pembangunan sekarang ini sudah harus dijadikan sebagai subyek pembangunan, artinya paradigma pembangunan yang dahulu masyarakat hanya sebagai penerima apa yang dilaksanakan pemerintah sekarang masyarakat perlu dilibatkan dalam merumuskan dan melaksanakan pembangunan itu sendiri.

Kemampuan anggota legislatif dalam melihat hambatan dan peluang yang ada dewasa ini menjadi penting, apalagi Kabupaten Kapuas Hulu merupakan kabupaten yang berbatasan dengan Negara Malaysia. Seperti diungkapkan anggota Komisi B DPRD Kabupaten kapuas Hulu untuk meningkatkan kemampuan anggota Legislatif di Kapuas Hulu, anggota DPRD telah melakukan beberapa kunjungan kerja maupun studi banding kebebarapa Daerah yang ada di Indonesia, seperti melihat bagaimana mengelola perkebunan, perikanan maupun pada sektor yang lainnya.

Dengan melaksanakan studi banding tersebut sudah seharusnya kemampuan yang dimiliki anggota DPRD tersebut dapat meningkat dari yang sebelumnya tidak memahami menjadi paham bagaimana mengelola potensi yang ada di Kabupaten Kapuas hulu, dan tentunya hasil nyata akan di rasakan oleh masyarakat banyak yang ada di Kapuas Hulu. Akan tetapi berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan terhadap studi banding yang dilakukan anggota DPRD tersebut belum terlalu memberikan kontribusi yang nyata terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Seharusnya dari hasil studi banding tersebut apa yang diamati di daerah yang dikunjungi dan potensinya sama dapat dibuat peraturan daerah, sehingga studi banding ini dapat dikatakan memberikan manfaat bagi pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu kedepannya.

Peningkatan kemampuan yang dilaksanakan di DPRD selain melaksanakan studi banding juga dapat dilakukan dengan mengikuti seminar yang berkaitan dengan pengolahan potensi dan pemerintahan.

Dengan demikian akan dapat dijadikan referensi bagi anggota DPRD kepada Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan yang berhasil baik tidak akan terjadi dengan sendirinya apabila antara eksekutif dan Legislatif tidak bekerjasama dengan apik.

Seperti dikatakan Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu inisiatif anggota DPRD sangat penting guna menunjang kelancaran pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten, pengawasan yang ketat terhadap program yang menjadi Visi dan Misi pemerintahan juga harus dilakukan agar fokus pembangunan yang akan di laksanakan mencapai tujuan yang di harapkan. Kemampuan anggota DPRD yang ada menurutnya sangat bervariasi, tingkat pendidikan bukan jaminan bagi anggota DPRD memiliki kemampuan yang baik, akan tetapi kejelian serta bagaimana melaksanakan komunikasi baik kepada eksekutif maupun masyarakat itu yang sangat penting.

Pembangunan menurut Ketua DPRD Kapuas Hulu bukan hanya di laksanakan untuk memenuhi tuntutan konstituen semata akan tetapi pembangunan yang dilaksanakan merupakan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat keseluruhan. Oleh sebab itu dikatakannya pembangunan yang di laksanakan bukan merupakan ambisi dari anggota DPRD maupun eksekutif saja akan tetapi pembangunan yang dilaksanakan harus didasari atas pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Kapuas Hulu secara keseluruhan.

Dari kunjungan yang dilakukan di daerah lain seharusnya akan dijadikan acuan untuk membuat peraturan daerah, peraturan Daerah yang di buat berdasarkan potensi yang di miliki Kabupaten kapuas Hulu akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kapuas hulu itu sendiri. Peningkatan kemampuan anggota DPRD dengan melakukan kunjungan atau studi banding ke Daerah lain sangat di perlukan. Karena dengan semakin banyak membandingkan potensi yang di miliki sama kemudian dituangkan kedalam peraturan daerah akan mempermudah anggota DPRD untuk membuat Peraturan daerah serta pelaksanaannya.

Akan tetapi seperti dikatakan Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu setelah melaksanakan studi banding tidak semua apa yang dijadikan obyek perhatian dijadikan referensi untuk pembuatan Peraturan Daerah, hal ini di sebabkan masih adanya pandangan yang berbeda dikalangan anggota DPRD dalam melihat potensi yang semulanya dijadikan obyek perhatian studi banding dan kemampuan anggota dalam merumuskan potensi tersebut ke dalam peraturan daerah.

Bagi pemerintah daerah peraturan itu sendiri akan dijadikan acuan dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. Peraturan Daerah yang di hasilkan dari studi banding di Daerah lain ini akan memberikan nuansa baru bagi pemerintah. Bagi DPRD sendiri sebenarnya akan sangat berarti apabila dalam satu periode mereka dapat menghasilkan banyak peraturan daerah, apalagi kalau peraturan daerah tersebut dapat dilaksanakan pemerintah dengan baik dan memberikan

kontribusi bagi pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dilihat dari potensi yang dimiliki Kabupaten kapuas Hulu sebenarnya cukup memberikan peluang bagi kabupaten ini dan masyarakat Kapuas Hulu untuk disejajarkan dengan kabupaten lainnya yang lebih maju, menurut observasi penulis sebenarnya tidak terlalu sulit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kapuas Hulu, yang paling penting diperhatikan adalah bagaimana melihat peluang terhadap potensi yang memiliki nilai kompetitif dan komparatif terhadap potensi yang ada. Berdasarkan observasi penulis bahwa kabupaten kapuas Hulu masih memiliki lahan yang belum diolah atau sudah tidak produktif, lahan tersebut seharusnya diberdayakan untuk perkebunan. Walaupun akhir-akhir ini perkebunan banyak menimbulkan masalah, akan tetapi permasalahan ini dapat di selesaikan apabila peraturan hukumnya serta administrasi yang di terapkan secara baik. Disinilah perlunya peraturan daerah guna mengatur jalannya pemerintahan serta melaksanakan berbagai kegiatan yang nantinya akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah Kapuas Hulu sendiri.

Disinilah perlu kejelian anggota DPRD dalam mengembangkan Kabupaten Kapuas Hulu, semua itu akan kembali kepada kemauan anggota DPRD apakah setelah melaksanakan studi banding, hasilnya akan dijadikan referensi untuk pembuatan peraturan daerah atau tidak. Kalau hasil dari studi banding tersebut di jadikan acuan untuk membuat peraturan daerah maka hasil dari perjalanan yang katanya untuk meningkatkan kemampuan

ini tentu memiliki nilai manfaat, dan apabila tidak ada peraturan daerah yang di buat setelah melakukan studi banding di daerah lain maka tentunya perjalanan tersebut akan menjadi sia-sia atau munggaran daerah.

DISKUSI

Keberadaan anggota Legislatif sangat dibutuhkan guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kemampuan anggota Legislatif dewasa ini bukan hanya bagaimana menggalang dukungan sebesar-besarnya dari konstituen semata, akan tetapi kemampuan yang harus dimiliki adalah kemampuan intelektual dan kemampuan seorang anggota legislatif tersebut dalam memahami berbagai kebutuhan masyarakat di daerah.

Sebagai perwakilan masyarakat dan perpanjangan tangan masyarakat maka sudah seharusnya seorang anggota legislatif ini dapat bekerjasama dengan Pemerintah daerah. Guna meningkatkan kemampuan ini perlu di lakukan berbagai kajian dan studi banding ke daerah lain yang memiliki potensi sama dengan daerah yang dapat di kembangkan. Studi banding yang dilakukan anggota legislatif ini bukan hanya sebagai ajang jalan-jalan, akan tetapi studi banding ini seharusnya menghasilkan berbagai kegiatan yang akan diaplikasikan di Daerah.

Anggota DPRD merupakan perwakilan rakyat yang diberikan amanah untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, sudah seharusnya bekerja untuk masyarakat. Dalam berbagai kegiatan yang akan direncanakan sebaiknya anggota DPRD melakukan komunikasi dan bekerjasama dengan eksekutif, sehingga apa yang akan dilaksanakan merupakan pemenuhan kebu-

tuhan masyarakat secara keseluruhan. Walaupun disadari bahwa kebutuhan masyarakat itu tidak sedikit, akan tetapi kebutuhan yang sangat mendasar itulah yang harus diperhatikan. Perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan bukan hanya terkait dengan peraturan pemerintah akan tetapi juga bagaimana perencanaan yang dibuat dapat meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat terkait dengan minimnya infrastruktur yang dimilikinya.

Keberhasilan pemerintah yang bermitra dengan legislatif akan di dapatkan apabila seorang anggota legislatif maupun lembaga legislatif ini dapat melaksanakan fungsi mereka dengan baik. Kemampuan pemerintah daerah yang sangat terbatas ini akan dapat diatasi apabila lembaga Legislatif dapat melaksanakan tugas dan fungsi mereka. Studi banding yang dilakukan seharusnya akan dapat menghasilkan produk yang nantinya dapat diaplikasikan di daerah. Produk yang dimaksudkan ini adalah berupa peraturan daerah.

Semakin kompleknya kebutuhan masyarakat dewasa ini mengharuskan setiap aparatur memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang sedang dihadapi. Dengan demikian studi banding yang dilakukan seharusnya sesuai dengan potensi daerah yang dapat meningkatkan pembangunan di daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta dapat membantu pemerintah daerah guna meningkatkan pendapatan daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan dikalangan anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu terkait dengan kemampuan anggota DPRD dalam membuat Peraturan Daerah, ternyata masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti.

Masih kurangnya kemampuan yang dimiliki anggota DPRD dalam merumuskan dan melihat peluang yang akan dijadikan perda.

Dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan untuk melaksanakan studi banding ternyata tidak sebanding dengan perda yang dihasilkan,

Masih lemahnya kemampuan anggota DPRD melihat kebutuhan masyarakat dan pemerintahan sehingga banyak potensi yang seharusnya dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan masyarakat dan pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu menjadi terbuang.

Saran

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan di DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, ternyata kemampuan yang dimiliki anggota DPRD sangat bervariasi, tingkat pendidikan tidak terlalu mempengaruhi perbedaan tersebut. Oleh karena itu penulis menyarankan beberapa hal.

Pertama, studi banding yang dilakukan sangat diperlukan akan tetapi hasil studi banding tersebut dapat dijadikan referensi bagi anggota DPRD untuk membuat perda sesuai dengan apa yang dibandingkan dengan daerah tujuan.

Dalam membuat Perda seharusnya sesuai dengan potensi Daerah, bukan hanya didasari atas kepentingan tertentu,

Anggota DPRD merupakan perpanjangan tangan masyarakat sudah seharusnya bekerja untuk masyarakat. Oleh karena itu komunikasi sangat penting dilakukan oleh anggota DPRD dengan masyarakat, sehingga apa yang direncanakan dapat dinikmati dan dirasakan masyarakat keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Harjana, Agus. M. 2001, *Training SDM Yang Efektif*, Kanisius, Yogyakarta.
- Kumrotomo, Wahyudi, 1999. *Etika Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004, *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*, Penerbit GAVA Media.
- Yuniarsih, Tjutju, Suwatno, 2008, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Teori Aplikasi dan Isu Penelitian* Diterbitkan Atas Kerjasama Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia dengan Penerbit ALFA BETA, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.